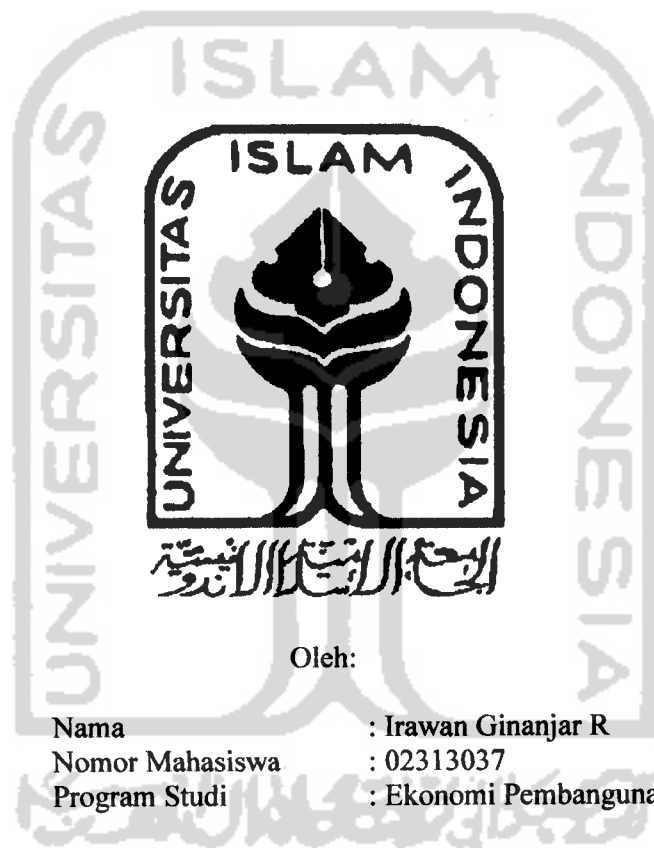


**ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
KE DAERAH**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Irawan Ginanjar R

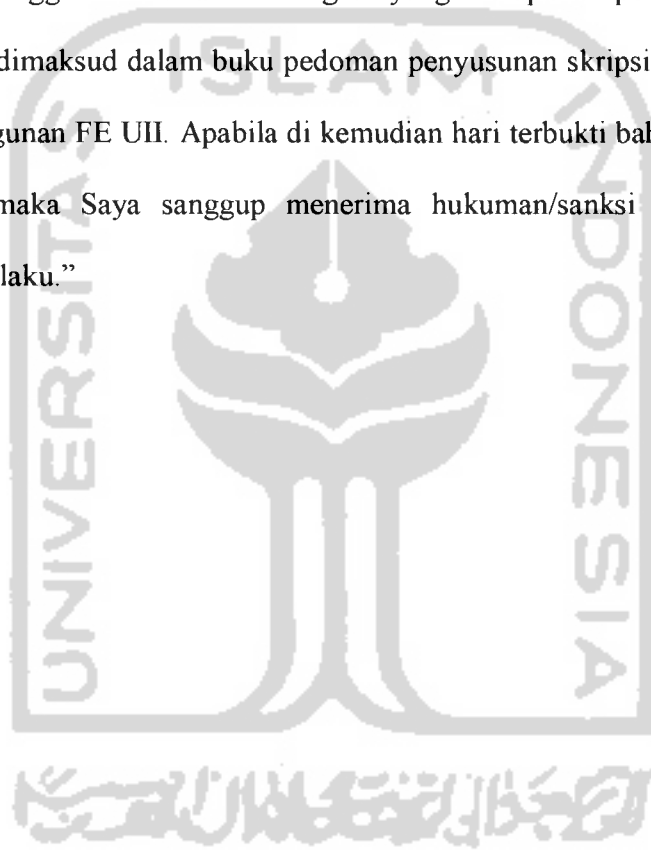
Nomor Mahasiswa : 02313037

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



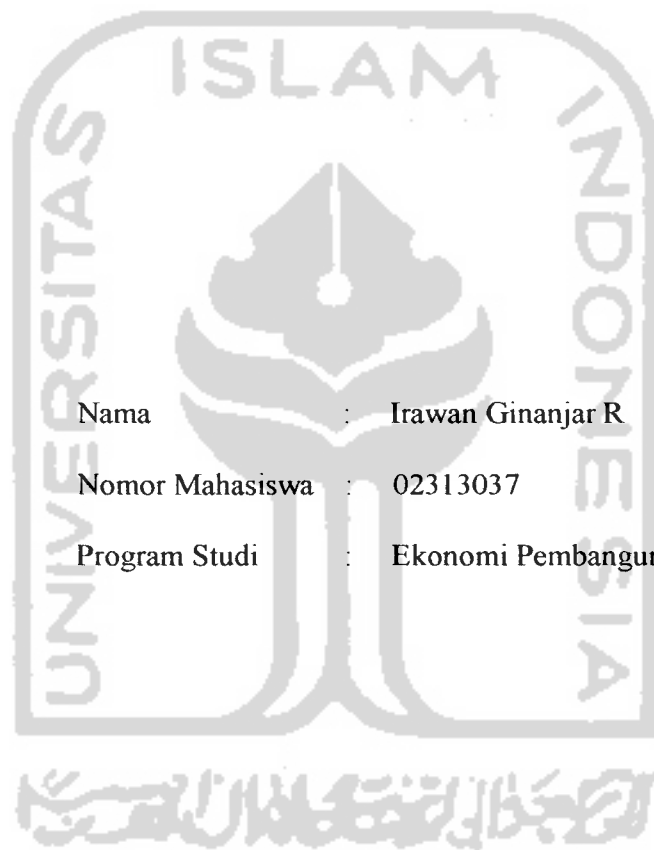
Yogyakarta, 9 Maret 2006

Penulis,

Irawan Ginanjar R

PENGESAHAN

Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah



Nama : Irawan Ginanjar R

Nomor Mahasiswa : 02313037

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 9 Maret 2006

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Widarjono'.

Drs. Agus Widarjono, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH

Disusun Oleh: **IRAWAN GINANJAR RAHARJO**
Nomor mahasiswa: 02313037

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 21 April 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA



Penguji I : Drs. Akhsyim Afandi, MA



Penguji II : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarnono, MA



MOTTO

“Persaingan kehidupan yang tidak sehat akan membuat kamu lalai,

Sampai kamu masuk liang kubur.

Jangan berbuat demikian, kamu kelak akan mengetahuinya.

Sekali mlagi jangan demikian, kamu sungguh akan mengetahuinya.”

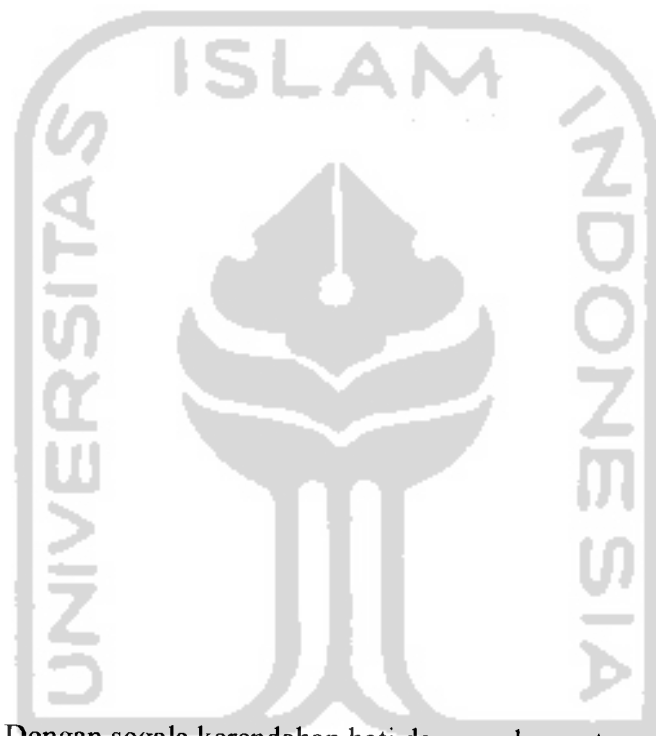
(Al-Qur'an; At-Takaatsur: 1-4)

“Kamu tidak akan memperoleh keinginanmu, kecuali bila ALLAH menghendaki.

ALLAH maha mengetahui dan bijaksana”

(Al-Qur'an; Al-Insan:30)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat,

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta atas segala bimbingan, nasehat, dukungan, kasih sayang dan do'a yang tulus.
- Adiku tersayang Angga atas segala motivasi dan do'a.
- Keluarga besar Imam Soeharjo (almarhum)
- Keluarga besar Santari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah rabbal' alamin. Tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah dan Dialah dzat yang maha agung. Berkat sifat kasih sayang, iradah dan kuasa-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan. Betatapun pintar dan kerja kerasnya seorang manusia, tanpa perkenan-Nya maka pekerjaan yang sedang dikerjakannya tidak mungkin selesai. Demikian dengan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan penuh pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia adalah juga berkat petunjuk dan perkenan-Nya.

Skripsi yang berjudul “ Analisis Konsumsi Di Negara Asean” adalah suatu analisa berdasarkan penelitian yang menggambarkan tentang faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumsi di negara Asean.

Kesempatan yang baik ini penulis sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah bisa memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis selama menyelesaikan penulisan penelitian ini semoga Allah SWT memberikan amal yang terbaik pada mereka dan semoga bisa berguna kepada pembaca.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Agus Widarjono, Drs, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan dan penuh kebijaksanaan memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh pengajar di Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Kepada pengurus perpustakaan Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, terima kasih atas pinjaman bukunya.
5. Serta beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk membacanya.

Yogyakarta, 9 Maret 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiatisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	ix
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Abstrak.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1..Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. SUBYEK PENELITIAN.....	7
2.1 Profil Propinsi Jawa Tengah	7
2.2 Jumlah Penduduk	8
2.3 Kepadatan Penduduk	9

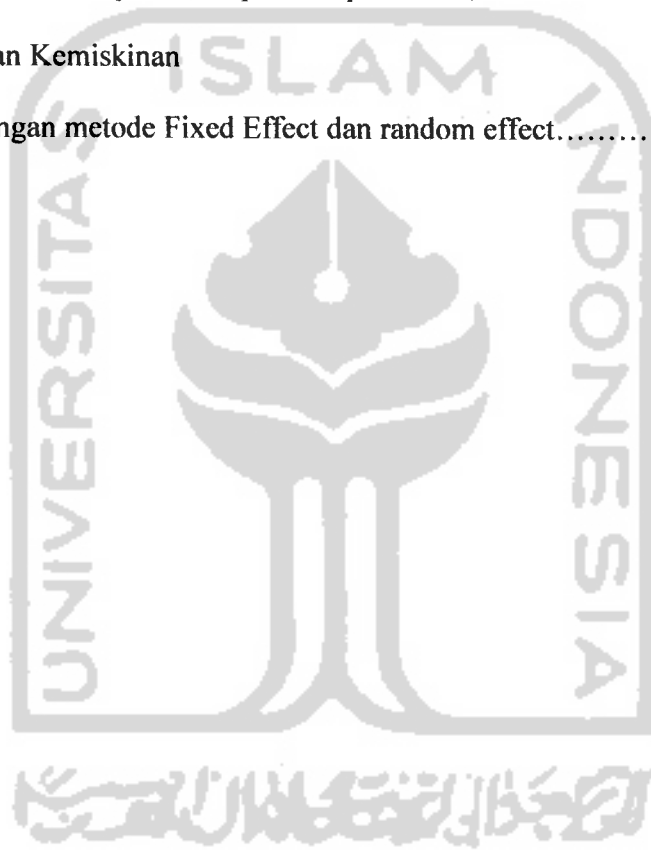
2.4 Jumlah Usia sekolah	9
2.5. Kemiskinan	10
BAB 111. KAJIAN PUSTAKA.....	14
BAB IV. LANDASAN TEORI.....	18
4.1. Pembangunan Ekonomi.....	18
4.1.1. Masalah Pokok pembangunan Ekonomi.....	18
4.1.2. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	19
4.1.3. Mashab Analitis	20
4.1.3.1. Adam Smith.....	20
4.1.3.2. David Ricardo.....	20
4.1.3.3. Solow dan Swan.....	21
4.1.4. Otonomi Daerah.....	22
4.1.5. Dana Perimbangan.....	24
4.1.6. Formula Dana Alokasi Umum	26
4.2. Hipotesisi.....	31
BAB V. METODE PENELITIAN.....	26
5.1. Jenis dan Sumber Data.....	32
5.2. Metode Analisis Data	32
BAB VI. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	38
6.1. Data.....	38
6.2. Deskripsi Data.....	38
6.3. Analisa hasil regresi.....	39
6.3.1. Hasil Regresi.....	40

6.3.2. Uji Hausman	40
6.4. Pengujian Statistik	41
6.4.1. Pengujian Secara Parsial	41
6.4.2. Penaksiran koefisien determinasi majemuk (R^2).....	43
BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	45
7.1. Simpulan.....	45
7.2. Implikasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Dana Alokasi Umum, Populasi, Kepadatan penduduk, Jumlah Usia sekolah dan Kemiskinan	12
2. Hasil regresi dengan metode Fixed Effect dan random effect.....	40



ABSTRAK

Pada skripsi ini akan dibahas mengenai transfer dana dari pemerintah pusat – daerah dan beberapa variable yang mempengaruhinya yaitu yaitu populasi, kepadatan penduduk, jumlah usia sekolah dan kemiskinan.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dari tahun 2002 - 2003. Metode analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan *Random Effect*.

Analisis dengan panel data digunakan karena penelitian ini menggunakan dua data yaitu data *time series* dan *cross section* dan meneliti tentang transfer dana di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Dengan analisis panel data dengan pendekatan *Random Effect* didapatkan hasil bahwa populasi, jumlah usia sekolah, kemiskinan berpengaruh secara signifikan.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Mardiasmo,2002)

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah (Mardiasmo,2002)

Kritik yang muncul selama ini adalah Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap Daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas Daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang

profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik

investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal dan memberi keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, tetapi apakah setiap daerah mampu membiayai pembangunan daerah sendiri yang hanya mengandalkan pendapatan lokal? Hal ini tentu saja tidak mungkin oleh karena itu pemerintah daerah membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dan perimbangan. .

Dana perimbangan terdiri dari:

- (I) bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan sumber daya alam;
- (ii) dana alokasi umum; dan
- (iii) dana alokasi khusus.

Dengan berdasar latar belakang diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya, hal ini dibuktikan dengan melihat perbandingan rata-rata PAD tahun 2002 sebesar Rp. 21.314.276 dengan rata-rata pengeluaran tahun 2002 tiap-tiap daerah sebesar Rp. 289.653.324 . Oleh karena itu masih diperlukan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Besar kecilnya Dana Alokasi Umum tiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi perbedaan alokasi dana dari pusat ke daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

yang berjudul “ ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH”

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor jumlah penduduk berpengaruh terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah?
2. Apakah faktor kepadatan penduduk berpengaruh terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah?
3. Apakah faktor jumlah usia sekolah berpengaruh terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah?
4. Apakah faktor kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan yang diharapkan akan tercapai, tujuan tersebut ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah usia sekolah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah.

4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai wadah bagi penulis untuk menambah wawasan dan untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
3. Sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkannya.

8. Sistematika penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 Tinjauan umum obyek penelitian

Bab ini merupakan uraian, diskripsi, gambaran secara umum atas objek – penelitian.

Bab 3 Kajian Pustaka

Teori yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Bab 4 Landasan Teori dan Hipotesis

Berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab 5 Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dengan bantuan komputer dan pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis

Bab 7 Kesimpulan dan saran

Bagian terakhir atau penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penulis yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Profil Propinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua propinsi besar Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ lintang selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ bujur timur (termasuk pulau karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263km dan dari utara ke selatan 226km (tidak termasuk pulau karimunjawa) Sepanjang bagian utara dan selatan terbentang pantai yang cukup panjang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 3.254.412 Ha atau sekitar 25,4 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia), secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota dengan 563 kecamatan 8.553 desa/kelurahan. Daerah yang terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 213.851 Ha atau sekitar 6,57 persen dari luas total Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya seluas 1.812 Ha. Dan data luas wilayah tiap-tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan Buku Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2004, suhu udara rata-rata maksimum dan minimum menurut stasiun di Jawa Tengah Tahun 2003 yaitu

maksimum 33,9 °C dan minimum 18,1 °C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata dari 73-86 %. Curah hujan tertinggi tercatat di Kebumen yaitu 3.578 mm dan hari hujan terbanyak di Cilacap sebesar 204 hari.

Setelah adanya otonomi daerah, pemerintahan diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat tidak begitu saja menyerahkan semua tanggung jawabnya ke daerah, oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan dana yang berbentuk Dana Alokasi Umum, dan data dari Dana Alokasi Umum tercantum dalam tabel 1.

2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk besar merupakan potensi pembangunan yang besar, tetapi penduduk yang besar bukan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dapat menjadi bencana terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan data dari BPS Propinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2003 adalah 32.052.840 jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dibandingkan tahun 2002 (31.691.866 jiwa) terjadi penambahan jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 360.974 jiwa (1,14 %). Dan data jumlah penduduk tiap-tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1.

2.3 Kepadatan Penduduk

Salah satu data statistik yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis besar kecilnya dana perimbangan yang dialokasikan ke pemerintah daerah adalah data tingkat kepadatan penduduk. Penyebaran penduduk Jawa Tengah belum secara merata, rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 985 jiwa setiap kilometer persegi, dimana wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu setiap kilometer persegi. Terlampir Data Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dalam tabel 1.

2.4 Jumlah Usia Sekolah

Pada tahun 2003 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berusia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 2.932.376 orang, tidak tamat/belum tamat SD/MI sebesar 6.025.940 orang, tamat SD/MI sebesar 9.583.156 orang, tamat SLTP sebesar 4.136.710, tamat SLTA sebesar 3.066.563 orang, tamat Diploma I/II sebesar 165.387 orang, tamat Akademi/Diploma IV/ Universitas/Perguruan Tinggi sebesar 573.085 orang.

Dibandingkan dengan tahun 2002, telah terjadi peningkatan di bidang pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan, artinya semakin banyak orang yang yang bisa menikmati pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Akan tetapi bila dicermati, ternyata pada tahun 2003 jumlah penduduk perempuan yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf dan tidak/belum pernah sekolah lebih banyak daripada penduduk laki-laki, sementara yang tamat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, AK/Diploma dan tamat Universitas lebih rendah daripada penduduk laki-laki.

Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan daripada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Besar kecilnya jumlah penduduk yang bersekolah di tiap-tiap daerah diperkirakan dapat menyebabkan perbedaan alokasi dana perimbangan, dan data jumlah penduduk di tiap-tiap daerah yang bersekolah usia 10 tahun ke atas di Propinsi Jawa Tengah tahun 2002 - 2003 dapat dilihat pada tabel 1.

2.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di bagi 3, kemiskinan tinggi, sedang, rendah, maka pada tahun 2002 tercatat 2 kabupaten termiskin adalah kabupaten Brebes, Grobogan dan Kebumen, tetapi dalam periode 2 tahun terakhir terjadi peningkatan walaupun kecil, disini terlihat dengan mengurangnya jumlah penduduk miskinnya. Tetapi ada kabupaten yang penduduk miskinnya bertambah yaitu kabupaten Purworejo, Karanganyar dan Demak. Fenomena pergeseran ini sangat penting bagi penentu kebijakan pemerintah daerah propinsi yang harus terus menerus

melakukan pementauan kondisi kesejahteraan rakyatnya, termasuk mengadakan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan, mana yang berjalan efektif dan mana yang tidak efektif.

Sampai saat ini masih sulit untuk membayangkan bahwa suatu daerah, baik propinsi, kabupaten maupun desa memiliki program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dari daerah lain. Sulit pula mengukur kinerja suatu pemerintah daerah dikaitkan dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu sebabnya adalah belum adanya kesamaan persepsi dari dinas-dinas di pemerintah daerah. Dalam hal ini peran pemerintah pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan sangatlah diperlukan oleh karena itu dalam pembagian dana perimbangan apakah diprioritaskan ke daerah miskin atau tidak, data dari jumlah penduduk miskin tiap-tiap daerah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Dana Alokasi Umum, Populasi, Kepadatan penduduk, Jumlah Usia Sekolah dan Kemiskinan
Tiap-tiap kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 - 2003

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	DAU (000Rp)		Populasi (jiwa)		Kepadatan penduduk (per Km ²)		Jumlah usia sekolah (jiwa)		Kemiskinan (ribuan)	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Kab. Cilacap	2138,51	328 181 809	368 270 000	1 630 832	1 641 849	763	768	593 043	581 742	360,7	343,1
Kab. Banyumas	1327,59	321 924 056	381 941 933	1 472 122	1 501 370	1 109	1 131	489 385	485 084	336,8	322,8
Kab. Purbalingga	777,65	234 944 963	245 460 355	795 874	846 924	1 023	1 089	272 165	297 872	258,2	264,8
Kab. Banjarnegara	1069,74	215 477 413	248 820 000	848 317	884 353	793	826	266 483	297 777	256,9	237,7
Kab. Kebumen	1262,74	283 640 000	315 400 000	1 176 102	1 193 850	917	151	413 135	392 222	372,6	370,1
Kab. Purworejo	1034,82	225 780 000	269 059 878	705 272	709 397	682	685	219 058	223 184	175,5	175,9
Kab. Wonosobo	984,68	215 728 576	237 249 611	750 939	759 018	763	807	248 451	271 133	253,5	250,2
Kab. Magelang	1085,73	271 415 356	300 629 991	1 127 714	1 142 467	1 039	1052	359 540	378 271	224	199,3
Kab. Boyolali	1015,07	250 946 369	292 070 000	906 530	925 722	893	912	313 466	313 099	188,4	171,1
Kab. Klaten	655,56	331 679 050	409 386 136	1 167 613	1 120 400	1 781	1708	367 760	341 761	286,5	267,1
Kab. Sukoharjo	466,66	205 280 000	253 710 000	799 493	807 635	1 713	1729	265 174	281 194	134,8	122,5
Kab. Wonogiri	1822,37	253 974 331	311 090 000	974 353	1 004 722	535	551	270 156	271 201	245,8	242
Kab. Karanganyar	772,2	222 497 813	266 550 000	786 557	811 877	1 019	1052	245 535	274 471	134	141,7
Kab. Sragen	946,49	238 900 000	271 940 000	855 948	859 986	904	909	284 990	270 388	245	232,3
Kab. Grobogan	1975,85	268 106 393		1 289 937	1 299 175	651	657	424 424	440 683	400,9	379,2
Kab. Blora	1794,4	286 552 490	270 140 000	821 588	826 702	458	461	269 388	265 247	218,4	193,3
Kab. Rembang	1014,1	173 125 944	188 930 000	566 288	576 417	558	568	177 326	189 013	189	184,8
Kab. Pati	1491,2	268 120 528	300 900 000	1 171 785	1 187 646	786	797	394 963	395 769	263,8	245,4
Kab. Kudus	425,17	185 867 627	228 308 491	718 253	738 410	1 689	1737	250 287	262 536	90,8	91,1

Kab. Jepara	1004,16	232.522.269	248.660.000	999.635	1.034.799	995	1031	366.669	373.106	105,5	104,6
Kab. Demak	897,43	196.740.000	245.940.000	1.009.863	1.024.934	1.125	1143	374.305	376.188	243,8	250,4
Kab. Semarang	946,86	215.290.000	258.283.871	842.242	879.785	890	929	278.100	291.199	147,9	123,5
Kab. Temanggung	870,23	106.510.000	221.660.000	710.991	694.892	817	799	215.810	219.334	112,6	109
Kab. Kendal	1002,27	286.810.000	270.560.000	859.471	882.145	858	880	302.740	300.632	204,1	201,4
Kab. Batang	788,95	212.735.650	224.887.875	674.307	692.519	855	878	253.204	255.554	155	143,2
Kab. Pekalongan	836,13	205.220.000	222.580.000	819.397	829.984	980	993	317.336	312.232	215,3	196,4
Kab. Pemalang	1011,9	250.279.318	297.359.580	1.343.951	1.316.977	1.328	1301	462.461	493.515	330,8	316,3
Kab. Tegal	879,7	256.867.600	309.629.615	1.410.057	1.429.345	1.603	1624	536.635	527.321	313,4	306,2
Kab. Brebes	1657,73	304.222.462	357.380.000	1.728.808	1.763.581	1.043	1064	643.723	665.581	576,7	549,9
Kota Magelang	18,12	106.457.876	119.980.000	116.498	119.400	6.429	6633	35.483	35.805	16,4	17,7
Kota Surakarta	44,03	178.390.000	232.341.997	488.168	485.501	11.087	11034	155.343	165.338	69,4	72,8
Kota Salatiga	52,96	100.590.974	105.690.000	163.079	158.112	3.079	2983	58.545	55.924	20,1	18,3
Kota Semarang	373,67	266.950.000	308.710.000	1.455.994	1.389.416	3.896	3715	513.672	486.112	103,4	91,8
Kota Pekalongan	44,96	99.269.950	122.170.000	265.829	271.418	5.912	6032	98.908	97.390	26,3	20,7
Kota Tegal	34,49	163.413.857	151.650.000	238.059	22.112	6.902	7121	86.326	91.021	31,7	23,1

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Penulis menjadikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadikan acuan pustaka diantaranya:

3.1 Jamesen Boex

Menurut Jamesen Boex dari *Department of economic, Andrew young school of policy Studies, Georgia State University, Atlanta, US*, Dari penelitiannya yang berjudul “ *The Incidence of local government allocations in Tanzania*” ditemukan pertanyaan Apakah pembiayaan tiap daerah sama? dan apa yang menentukan distribusi sumber daya pemerintah daerah? dengan kata lain kenapa tiap daerah itu berbeda. Menurut seperti apa yang telah ditulisnya yaitu tentang alokasi sumber daya yang terjadi di Tanzania, pemerintah daerah di Tanzania merumuskan anggaran sendiri tetapi didasarkan pada suatu kerangka yaitu NMS “Standar Minimum Nasional” dan anggaran nasional ini dimasukan dalam kerangka anggaran nasional. Menurut hasil analisisnya yang melihat dari beberapa variable yaitu antara lain: Kemiskinan, Kepadatan, Jumlah Usia Sekolah, Populasi, Konsumsi, bahwa di Tanzania alokasi sumber daya pemerintah pusat lebih cenderung ke daerah perkotaan terutama dalam kasus sumber daya pendidikan, dan menurutnya hal ini pantas karena mereka membawa beban regional yang cukup besar. Yang kedua daerah dengan populasi lebih besar tentu saja menerima alokasi lebih kecil ketika diukur terminologi per kapita.

3.2 Yogi Vidyatama, S.E

Menurut penelitiannya yang berjudul "*Metode menilai transfer pusat-daerah*" merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan undang-undang No.22 tahun 1999 dan No.25 tahun 1999 yaitu

1. Apakah selama ini pembagian keuangan daerah memang belum adil?
2. Apakah pembagian keuangan daerah mengacu pada efektifitas dan efisiensi?

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan analisa terhadap adanya kebijakan baru dari sisi keadilan dan pemerataan

Implikasi dari munculnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 adalah perubahan kewenangan yang berakibat adanya perubahan besar pada APBD, baik dalam pengeluaran maupun pemasukan. Dan akibat dari perubahan kewenangan itu maka mata anggaran proyek sebagian besar akan pindah ke APBD Dati II, artinya 95% dari pengeluaran pembangunan harus diserahkan pengelolaanya kepada daerah.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah selama ini secara langsung maupun tidak langsung daerah yang memiliki pendapatan lebih baik mendapat transfer yang lebih besar, namun begitu daerah tersebut juga memiliki pengeluaran lebih besar pula. Selain itu menurutnya selama ini hasil SDA yang dieksploitasi suatu daerah tidak memberi dampak terhadap kondisi fiscal daerah tersebut bahkan korelasina negative. Dan dilihat dari sisi efisiensi maka perhatian terbesar dalam distribusi dana dari pusat ke daerah adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kecamatan.

3.3 Haryo Kuncoro

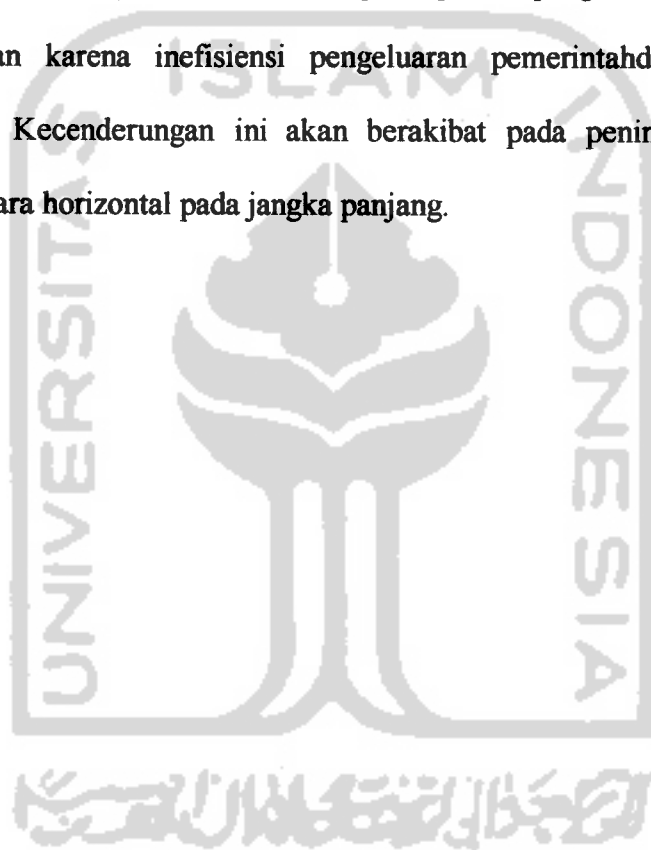
Dalam penelitiannya yang berjudul *"Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiscal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia"* menggambarkan bahwa transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak local, akibatnya pemerintah daerah akan terus menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat. Dominannya peran transfer relative terhadap PAD dalam membiayai pengeluaran daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi.

Menurut hasil estimasinya variable kepadatan penduduk berpengaruh negative secara signifikan pada perubahan penerimaan. Secara konseptual seharusnya kepadatan penduduk seharusnya berpengaruh positif dalam perolehan transfer, tanda negative demikian hanya merupakan konsekuensi dari bentuk penerimaan transfer per kapita, dan dari sisi lain kenaikan jumlah penduduk berasosiasi dengan kenaikan kepadatan penduduk, sehingga hubungan antara penerimaan transfer per kapita dan kepadatan penduduk menjadi negatif. Total pengeluaran pemerintah daerah memberi hasil yang searah dalam mempengaruhi penerimaan transfer hal tersebut berbeda dengan variable pendapatan riil per kapita yang memperlihatkan signifikansi yang berbeda pada penerimaan transfer.

Simpulan dari yang beliau tulis mengindikasikan sikap pemerintah daerah yang overaktif terhadap arti pentingnya transfer, bagi pemerintah pusat, transfer diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali

sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun penggalan PAD yang hanya didasarkan pada factor incremental akan berakibat negative pada perekonomian daerah.

Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang lebih tinggi. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran rutin. Kecenderungan ini akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiscal secara horizontal pada jangka panjang.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999)

4.1.1. Masalah pokok pembangunan ekonomi

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

4.1.2. Teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Dari definisi diatas jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus.
2. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan riil per kapita, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk.
3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus menerus berlangsung dalam jangka panjang, aspek yang ketiga dan konsepsi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif jangka panjang (Boediono, 1988, hal.2)

Pada dasarnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

4.1.3. Mashab Analitis

Teori-teori pembangunan ekonomi yang termasuk dalam mashab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat asas (konsisten), tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan pada aspek historisnya. Metoda kajian mashab ini bersifat deduktis teoritis. Kecenderungan semacam ini tampak dalam teori-teori pertumbuhan “moderen” (Lincoln Arsyad, 1999)

4.1.3.1. Adam Smith

Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu:

1. Pertumbuhan output total
 - a) Sumber daya alam yang tersedia (factor-faktor produksi tanah)
 - b) Sumber daya insani (Jumlah penduduk)
 - c) Stok barang modal yang ada
2. Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistensi yaitu tingkat upah pas-pasan untuk hidup.

4.1.3.2. David Ricardo

Ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut:

1. Jumlah tanah terbatas
2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimum.

3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.

4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.

5. Sektor pertanian dominant

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat juga penurunan tingkat hidup kearah tingkat hidup minimum. Proses ini tidak lain adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu:

1. *The law of diminishing return.*
2. Kemajuan teknologi.

4.1.3.3. Solow dan Swan

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan factor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal). Garis besar proses pertumbuhan yang digunakan Solow dan Swan hamper sama dengan yang digambarkan Harod-Domar. Ada empat anggapan yang melandasi model neo klasik, yaitu:

1. Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.
2. Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode.
3. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan dalam proporsi tertentu dari output.

4. semua tabungan masyarakat diinvestasikan.

4.1.4. Otonomi daerah

Berdasar UU No.22 Tahun 1999, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan **daerah otonom** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi rakyat dalam ikatan NKRI. Berbicara tentang otonomi daerah substansi yang termuat didalamnya adalah

- Desentralisasi
- Dekonsentrasi
- Tugas pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang dibutuhkan (Baldric Siregar dan Bonni Siregar, 2001)

Pada dasarnya titik sentral otonomi Daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dimana salah satu aspek pentingnya adalah masalah keuangan. Dengan pelaksanaan otonomi Daerah, khususnya dibidang pengelolaan keuangan telah terjadi perubahan pola hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang selama ini dijalankan sampai dengan Tahun 2000. Pada hakekatnya hubungan keuangan Pusat dan Daerah meliputi masalah pembagian, yakni pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu pada tingkat pemerintahan serta pembagian sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata lain, hubungan ini menyangkut pembagian kekuasaan diantara tingkat pemerintahan.

Kewenangan dibidang keuangan yang pada dasarnya melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah, turut pula diserahkan untuk menjadi kewenangan Daerah. Termasuk dalam kesatuan penyerahan kewenangan ini adalah penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terkait dengan kewenangan tersebut. Adapun penyerahan kewenangan dibidang keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 diwujudkan dalam pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan Daerah sendiri (PAD) dan didukung dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan

Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya nasional diarahkan untuk mendukung pembiayaan yang dialokasikan kepada Daerah sesuai dengan potensi dan hasil Daerah guna melaksanakan otonomi daerah. Pengalokasian sumber daya nasional juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar Daerah yang bersangkutan. Potensi fiskal daerah sebagai sumber pembiayaan dikelola oleh daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam melayani masyarakat.

Pengaturan sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah selaras dengan sistem pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Inisiatif penyempurnaan UU No. 25 tahun 1999 tersebut adalah untuk menyelaraskan pembiayaan dengan kewenangan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara proporsional dan merata di seluruh daerah.

4.1.5 Dana Perimbangan

Penyerah tugas pemerintah harus diikuti dengan penyerahan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan, penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dituangkan dalam APBD, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Dana perimbangan. **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan ini adalah (Edy Suandi hamid, 2004)

1. **Bagi hasil pajak dan bukan pajak**
2. **Dana alokasi umum (DAU)**, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. **Dana alokasi khusus (DAK)**, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan tertentu.

Besarnya dana-dana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perimbangan yang diuraikan dalam pasal 6, 7, dan 8.

Dengan mengacu pasal-pasal tersebut dapat diformulasikan untuk level Kabupaten/Kota

- $\text{Penerimaan kabupaten/Kota} = \text{BD} + \text{DAU} + \text{DAK}$
- $\text{BD} = 90\% \text{ PBB} + 80\% \text{ BPHTB} + 64\% \text{ iuran HPH} + 32\% \text{ provisi sumber daya hutan} + 64\% \text{ iuran tetap hasil tambang} + 32\% \text{ royalty tambang} + \{80\%/\text{Jumlahkab/kota}\} \times \text{pungutan perikanan} + 6\% \text{ minyak bumi} + 12\% \text{ gas alam.}$
- $\text{DAU} = 90\% \times 25\% \times \text{Penerimaan Dalam Negeri APBN (minimal)}$
- $\text{DAK} = \text{tergantung pada kebutuhan khusus}$

Keterangan:

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana alokasi Khusus

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB = Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4.1.6. Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan penghitungan DAU Tahun Anggaran (TA) 2003 menggunakan formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (Fiscal gap) yang diatur dalam PP 84/2001 tentang dana perimbangan. Selain dengan formula kesenjangan fiskal, perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan factor penyeimbang berupa Alokasi Minimum (AM).

Formula DAU berdasar rancangan PP 55/2005 tentang dana perimbangan:

$$DAU = CF + AD$$

Ket:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

$$\text{DAU Kab/Kota}_i = \text{Bobot Kab/Kota}_i \times \text{DAU Kab/Kota}$$

di mana,

$$\text{Bobot Kab/Kota}_i = \frac{\text{CF Kab/Kota}_i}{\sum \text{CF Kab/Kota}}$$

Ket:

CF Kab/Kota_i = celah fiskal suatu daerah Kab/Kota

$\sum \text{CF Kab/Kota}$ = total celah fiskal seluruh Kab/Kota

Untuk maksud tersebut perlu ditentukan variable-variabel yang digunakan dan formula penghitungan kebutuhan daerah dan kapasitas fiskalnya. Variabel Kebutuhan Fiskal. Variabel yang digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan fiskal adalah sebagai berikut (Edy Suandi Hamid, 2005)

1. Jumlah Penduduk (P). Semakin besar jumlah penduduk mencerminkan semakin besar pula tingkat kebutuhan pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Luas Wilayah (W). Luas wilayah mencerminkan cakupan atau area yang menjadi tanggungjawab pelayanan publik pemerintah daerah. Semakin besar cakupan wilayah pelayanan maka semakin besar pula kebutuhan fiskal yang diperlukan.
3. Indeks Harga Bangunan (K). Variabel ini sebagai proksi dari kondisi geografis daerah yang berimplikasi pada tingkat kemahalan suatu wilayah.

4. Tingkat Kemiskinan (Km). Tingginya jumlah penduduk miskin menurut peran fiskal pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat kesejahteraan mereka.
5. Tingkat Kematian Bayi (Kb). Variabel ini mencerminkan kondisi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, dirumuskan formula kebutuhan Fiskal daerah I (FN_i) sebagai berikut:

$$FN_i = \overline{Png} \times (\alpha_1 P_i + \alpha_2 W_i + \alpha_3 K_i + \alpha_4 Km_i + \alpha_5 Kb_i)$$

Dimana

$$\overline{Png} = \frac{\sum_{j=1}^n Png_j}{n}$$

\overline{Png} = pengeluaran daerah-daerah rata-rata seluruh daerah .

α merupakan bobot masing-masing variabel yang dihitung dari koefisien estimasi persamaan berikut dengan metode ekonometrika :

$$\hat{P}ng = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 W + \alpha_3 K + \alpha_4 Km + \alpha_5 Kb$$

dimana

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 = 1$$

variabel Kapasitas Fiskal. Variabel yang digunakan untuk menentukan besarnya kapasitas fiskal adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil SDA (S). Variabel ini mencerminkan besarnya potensi sumber daya alam suatu daerah. Semakin besar poternsi sumber daya alam suatu daerah, akan semakin besar pola potensi penerimaan bagi hasilnya. Untuk memberikan

kompensasi atas biaya-biaya pemulihan lingkungan akibat eksploitasi SDA dan insentif bagi daerah untuk melakukan pemulihan atau perbaikan kondisi bagi daerah untuk melakukan pemulihan atau perbaikan kondisi lingkungannya maka SDA diperhitungkan 75%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*B*). dalam ketentuan UU No. 25/1999, penerimaan dari kedua variabel ini (*B*) sebagai besar dikembalikan kepada daerah sehingga dapat secara langsung mencerminkan potensi penerimaan suatu daerah.
3. Pajak Penghasilan (*H*). Variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (*PPH*) orang pribadi. Dalam PP Nomer 115 Tahun 2000, *PPH* orang pribadi merupakan bagian pendapatan yang sebagian (20%) dikembalikan kepada daerah, sehingga menambah potensi penerimaan daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah (*PAD*). Variabel yang digunakan adalah $PA\hat{D}$ (*PAD estimate*), yang besarnya ditaksir dengan menggunakan rata-rata *PAD* Indonesia, yang merupakan fungsi dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Sektor Sekunder dan tersier.
5. Potensi Sumber daya Manusia. Variabel yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*). *IPM* ini mencakup indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah), dan indeks standar hidup layak (yang diukur dari pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*)). Semakin baik indeks

pembangunan manusia, mencerminkan semakin baik kualitasnya angkatan kerjanya, sehingga memberi peluang lebih besar potensi penerimaan daerah.

6. Potensi Industri (Y). Variabel yang digunakan adalah PDRB sektor sekunder dan tersier daerah, dimana sektor ini mempunyai potensi yang tinggi bagi penerimaan keuangan daerah. Sektor tersebut adalah: sektor pengolahan; Listrik, gas, dan air minum; perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya ; serta jasa-jasa.

Dengan variabel- variabel tersebut, dirumuskan formula kapasitas

Fiskal daerah I (FC_i) Sebagai berikut:

$$Fci = (0,75S_i + B_i + H_i) + PA \hat{D}_i$$

Dimana;

$$PA \hat{D}_i = (\overline{PAD} \times (\beta_1 IPM_i + \beta_2 Y_i))$$

Dimana

$$\overline{PAD} = \frac{\sum_{j=1}^n PAD_j}{n}$$

n = jumlah daerah

dan β merupakan bobot yang diperoleh dari koefisien estimasi berikut;

$$PA \hat{D} = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 Y$$

Dimana

$$B_1 + \beta_2 = 1$$

Agar alokasi DAU sebesar persentase tertentu dari penerimaan dalam negara dapat mencukup secara tepat DAU semua daerah, maka besarnya DAU aktual (aDAU) yang menerima daerah adalah

$$aDAU_i = \left(\frac{DAU}{\sum_{i=1}^n DAU_i} \right) DAU_i$$

Dalam studi ini Dana Alokasi Umum ditentukan oleh variable-variabel kebutuhan daerah yang dicerminkan dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendapatan dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, sedangkan potensi ditambah pula dengan variable- variable yang terkait langsung dengan pembangunan manusia.

4.2 HIPOTESIS

1. Diduga pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi dana dari pusat ke daerah adalah positif.
2. Diduga pengaruh kepadatan penduduk terhadap alokasi dana dari pusat ke daerah adalah positif.
3. Diduga pengaruh jumlah usia sekolah terhadap alokasi dana dari pusat ke daerah adalah negatif
4. Diduga pengaruh kemiskinan terhadap alokasi dana dari pusat ke daerah adalah positif.

BAB V

Metode Penelitian

5.1. Jenis data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS setempat dan berbagai sumber yang terkait.

5.2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Regresi Panel Data*, yaitu regresi yang dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data cross section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari menggunakan metode ini. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel)

Model regresi dengan model data panel, secara umum akan mengakibatkan kita mempunyai kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual time series, cross section maupun gabungan keduanya.. Dalam pembagian dana alokasi dari pusat ke daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh populasi kepadatan, dan jumlah usia sekolah. Adapun model ekonomi dapat ditulis sebagai berikut:

$C = f(\text{Populasi, Kepadatan, Jumlah usia sekolah})$

Adapun model regresinya dalam bentuk log linier dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it}$$

Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect :

1. Pendekatan Fixed Effect

Pendekatan Common Effect mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar Kabupaten/Kota. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya. Karakteristik antar Kabupaten/Kota jelas akan berbeda. Salah satu cara paling sederhana mengetahui adanya perbedaan adalah dengan mengasumsikan bahwa intersep adalah berbeda antar Kabupaten/Kota sedangkan slopenya tetap sama antar Kabupaten/Kota. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan tersebut dinamakan model regresi Fixed Effect. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan pada adanya perbedaan intersep antar Kabupaten/Kota namun intersepanya sama antar waktu (time invariant). Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar Kabupaten/Kota dan antar waktu. Bagaimana kita bisa mengestimasi model Fixed Effect ini dimana intersep berbeda antar Kabupaten/Kota? Kita akan menggunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik Least squares Dummy Variables(LSDV). Model Fixed Effect dengan variabel dummy dapat ditulis sbb :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1i} + \dots + \beta_{34} D_{34i} + e_{it}$$

Dimana :

$D_{1i} = 1$ untuk Kabupaten Banyumas.

= 0 untuk Kabupaten lain

$D_{2i} = 1$ untuk Kabupaten Purbalingga.

= 0 untuk Kabupaten lain

$D_{34i} = 1$ untuk Kota Tegal

= 0 untuk Kota lain

Kita mempunyai 35 Kabupaten/Kota yang berbeda maka kita memerlukan 34 variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep antara 34 Kabupaten/Kota tersebut. Di dalam model ini Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten pembanding

2. Pendekatan Random Effect

Di dalam mengestimasi data panel dengan Fixed Effect melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang kita gunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual dikenal sebagai metode Random Effect. Di dalam model ini kita akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Namun demikian kita mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individual Kabupaten/Kota yang kita ambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Untuk menjelaskan model Random Effect kita tulis model perilaku alokasi dana dari pusat ke daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it} \quad (1.1)$$

Dalam hal ini β_{0i} tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i, \quad \text{dimana } i = 1, \dots, n \quad (1.2)$$

β_{0i} adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ_i adalah residual yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku negara secara individu. Dalam hal ini residual μ_i mempunyai karakteristik sebagai berikut:

$$E(\mu_i) = 0 \quad \text{dan} \quad \text{var}(\mu_i) = \sigma_\mu^2 \quad (1.3)$$

Sehingga $E(\beta_{0i}) = \bar{\beta}_0$ dan $\text{var}(\beta_{0i}) = \sigma_\mu^2$

Substitusi persamaan (1.2) ke dalam persamaan (1.1) akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{it} &= (\bar{\beta}_0 + \mu_i) + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it} \quad (1.4) \\ &= \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + (e_{it} + \mu_i) \\ &= \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + v_{it} \end{aligned}$$

dimana: $v_{it} = e_{it} + \mu_i$

Persamaan (1.4) merupakan persamaan untuk metode Random Effect

Uji Hausman

Adalah uji yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV didalam metode Fixed Effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, Di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Unsur penting untuk uji ini adalah kovarian matrik dari perbedaan vektor $\left[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right]$:

$$\text{Var} \left[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right] = \text{Var} \left[\hat{\beta} \right] + \text{Var} \left[\hat{\beta}_{GLS} \right] - \text{Cov} \left[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS} \right] - \text{Cov} \left[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS} \right]$$

(1.1)

Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol sehingga

$$\text{Cov} \left[\left(\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right), \hat{\beta}_{GLS} \right] := \text{Cov} \left[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS} \right] - \text{Var} \left[\hat{\beta}_{GLS} \right] = 0$$

(1.2)

$$\text{Cov} \left[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS} \right] = \text{Var} \hat{\beta}_{GLS}$$

Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan (1.1) akan menghasilkan kovarian matrik sebagai berikut:

$$\text{Var}[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}] = \text{Var}[\hat{\beta}] - \text{Var}[\hat{\beta}_{GLS}] = \text{Var}(\hat{q})$$

(1.3)

Selanjutnya mengikuti kriteria Wald. Uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi squares sebagai berikut:

$$m = \hat{q}' \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

(1.4)

dimana $\hat{q} = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$ dan $\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{GLS})$

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Squares dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect

BAB VI

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan empat variable independent yaitu populasi, kepadatan penduduk, jumlah usia sekolah dan kemiskinan, sedangkan variable dependennya adalah Dana Alokasi Umum

6.1. Data.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Data dari satu Propinsi sebanyak 34 kabupaten yang sebenarnya terdapat 35 kabupaten/kota tetapi kabupaten Grobogan tidak mendapat DAU pada tahun 2003 sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan. Sehingga secara keseluruhan dari 34 kabupaten tersebut data yang digunakan sebanyak 170 data, yaitu mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

6.2. Deskripsi Data.

1. Jumlah penduduk

Data populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data jumlah penduduk tiap kabupaten/kota yang terdapat di propinsi Jawa Tengah. Data tersebut diperoleh dari BPS Jawa Tengah.

3. Kepadatan penduduk

Data tentang kepadatan penduduk merupakan data dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah, sehingga satuan yang digunakan adalah km . Data tersebut diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan diolah.

3. Jumlah usia sekolah

Data ini adalah merupakan data dari jumlah usia sekolah menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002 dan 2003 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah.

4. Kemiskinan

Data ini merupakan data dari persentase penduduk miskin tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002 dan 2003 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah

6.3. Analisa hasil regresi.

Hasil regresi meliputi penyajian hasil regresi, pengujian hasil hubungan antara variable terikat (*dependent variable*), dengan variable bebas (*independent variable*). Secara statistic prosedur analisis yang dilakukan meliputi variable – variable penjelas secara serentak dan parsial

6.3.1. Hasil regresi.

Hasil perhitungan regresi yang dihitung dengan menggunakan program Eviews 3.0 dengan model regresi panel data dengan pendekatan Fixed Effect dan Random effect, maka didapat hasil regresi dari fixed effect dan Random effect yang disajikan dalam table berikut:

Tabel 2

Hasil Estimasi Regresi dengan metode Fixed Effect dan Random Effect

	Fixed Effect	Random Effect
C		12.71847
		12.29583
LOG(X1?)	-0.495889	0.824205
t-statistic	-0.314138	2.608796
LOG(X2?)	-0.098184	0.046239
t-statistic	-0.906562	1.15888
LOG(X3?)	1.257763	-0.435976
t-statistic	1.52051	-1.501707
LOG (X4?)	-0.596462	0.094418
t-statistic	-1.759214	1.334329
R ²	0.926134	0.829492
Adjusted R-squared	0.835033	0.818667
F Statistik	125.3806	
Durbin-Watson stat	3.885714	2.205626

6.3.2. Uji Hausman

Untuk memilih apakah menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect maka menggunakan uji Housman, Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik

Chi Squares dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect. Karena nilai statistic housman sebesar 10.35685 dan nilai kritisnya adalah 14.8602 maka nilai statistik Hausman < nilai kritisnya jadi dengan demikian berdasar uji Hausman model yang tepat untuk menganalisis adalah model Random Effect.

6.4. Pengujian statistic

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dapat digunakan atau tidaknya model yang dipakai sebagai perbandingan secara statistic. Maka diadakan pengujian secara parsial.

6.4.1. Pengujian secara parsial.

Untuk melihat apakah variable – variable penjelas mempunyai hubungan yang berarti (signifikan) dengan variable terikat dapat melalui:

1. Tanda parameter regresi dibandingkan dengan teori. Apabila tanda parameter regresi sesuai dengan teori maka dapat dikatakan hasil regresi mendukung teori.

2. Pengujian tersebut jika semakin tinggi t-hitung pada derajat keyakinan tertentu maka hubungan variable penjelas dengan variable yang dijelaskan mempunyai hubungan yang berarti atau signifikan secara statistik.

Dengan menggunakan $\alpha = 10\%$ dan derajat kebebasan $df = 64(n-k)$ diperoleh besarnya t tabel adalah kurang lebih 1.296, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel jumlah penduduk (X1).

Koefisien regresi variable jumlah penduduk adalah 0.824205, sedangkan t hitung adalah 2.608796. Karena t hitung > t tabel, maka secara statistic bahwa populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah

2. Pengujian terhadap variable kepadatan penduduk (X2)

Koefisien regresi variable kepadatan penduduk adalah 0.046239, sedangkan t hitung adalah 1.158880. Karena t hitung < t tabel, maka secara statistic bahwa populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah

3. Pengujian terhadap variabel jumlah usia sekolah (X3)

Koefisien regresi variable jumlah usia sekolah adalah -0.435976 sedangkan t hitungnya adalah -1.501707. Karena t hitung > t tabel, maka secara statistic

bahwa jumlah usia sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

4. Pengujian terhadap variabel kemiskinan (X_4)

Koefisien regresi variabel kemiskinan adalah 0.094418 sedangkan t hitungnya adalah 1.334329. Karena t hitung $>$ t tabel, maka secara statistik bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

6.4.2. Penaksiran koefisien determinan majemuk (R^2).

Pengujian dengan determinan majemuk (R^2) berfungsi untuk mengukur presentase total variabel terikat (Y) dijelaskan oleh variabel – variabel bebas. Dari hasil regresi data diperoleh nilai R^2 sebesar 0.829492 yang berarti bahwa variabel Y dijelaskan oleh variabel – variabel independen sebesar 82.9492% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.5. Interpretasi hasil analisa.

Elastisitas jumlah penduduk sebesar 0.824205 yang berarti jika jumlah penduduk naik 1% maka Y atau Dana alokasi umum tersebut akan naik sebesar 0.824205 %. Hal ini menunjukkan bahwa populasi sangat mempengaruhi dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk semakin besar beban regionalnya, maka perlu lebih banyak bantuan dana dari pemerintah pusat.

Elastisitas jumlah usia sekolah (X_3) sebesar -0.435976 yang berarti jika jumlah usia sekolah naik 1% , maka Y atau dana alokasi umum akan turun sebesar 0.435976% . Hal ini disebabkan karena variable jumlah usia sekolah merupakan bagian dari variable IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan variable dari penentu kapasitas fiskal. Karena semakin baik indeks pembangunan manusia, mencerminkan semakin baik kualitas angkatan kerjanya, sehingga memberi peluang lebih besar potensi penerimaan daerahnya.

Sedangkan Elastisitas kemiskinan (X_3) sebesar 0.094418 yang berarti jika kemiskinan naik 1% , maka Y atau dana alokasi umum akan naik sebesar 0.094418% . Hal ini menunjukkan variable kemiskinan sangat mempengaruhi dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Tingginya jumlah penduduk miskin menurut peran fiskal pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat kesejahteraan mereka.

Di antara variable- variable yang digunakan, ternyata variable jumlah penduduk merupakan factor yang paling dominant dalam mempengaruhi transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah di 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut dibandingkan factor- factor lainnya yaitu jumlah usia sekolah, kepadatan penduduk dan kemiskinan Hal ini dapat dilihat dari elastisitas jumlah penduduk yang lebih besar dari koefisien variable lainnya yaitu sebesar 0.824205% . Jadi jumlah penduduk sangat berperan dalam mempengaruhi besar kecilnya alokasi dan yang diterima kabupaten/kota di Jawa Tengah.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil empiris serta analisis peneliti mengenai transfer dana pemerintah pusat ke daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel jumlah penduduk signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Dengan demikian maka, besarnya kenaikan populasi akan mengakibatkan peningkatan dalam penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mungkin lebih dikarenakan beban regional yang di terima lebih besar sehingga membutuhkan lebih banyak bantuan dana dari pemerintah pusat

Variabel kepadatan penduduk tidak signifikan dan mempunyai koefisien yang positif. Variabel kepadatan penduduk kurang berpengaruh terhadap alokasi dana, hal ini dikarenakan variable kepadatan tidak masuk dalam perhitungan kebutuhan fiscal.

Variabel jumlah usia sekolah signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang negatif, yang berarti besarnya jumlah usia sekolah akan menyebabkan turunnya dalam penerimaan transfer. Hal ini disebabkan karena variable jumlah usia sekolah merupakan bagian dari variable IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan variable dari penentu kapasitas fiscal. Karena semakin baik indeks pembangunan manusia, mencerminkan semakin baik kualitas angkatan kerjanya, sehingga memberi peluang lebih besar potensi penerimaan daerahnya.

Variabel kemiskinan signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang positif.

Dengan demikian maka, besarnya kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan dalam penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya jumlah penduduk miskin menurut peran fiskal pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat kesejahteraan mereka.

Pengujian terhadap koefisien determinasi majemuk (R^2) menghasilkan nilai sebesar 82.9%. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 82.9% sedangkan sisanya sebesar 16.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

7.2 Implikasi.

Sebagai salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat, alokasi DAU mempunyai peranan yang cukup besar bagi pendapatan Daerah mengingat DAU menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan komponen lainnya dalam Dana Perimbangan. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. dengan tujuan semua daerah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk membiayai pengeluarannya dalam pelaksanaan azas desentralisasi Dengan adanya DAU ini diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antara Daerah yang maju dengan Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pembagian dana bagian Daerah melalui bagi hasil (revenue sharing) berdasarkan daerah penghasil (by origin) cenderung menimbulkan ketimpangan antar Daerah, dimana Daerah yang mempunyai

potensi pajak dan SDA yang besar hanya terbatas pada beberapa Daerah tertentu. Peran strategis distribusi DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing Daerah. Oleh karena itu, DAU untuk suatu Daerah ditetapkan berdasarkan *fiscal gap* yang dihitung berdasarkan potensi penerimaan (*fiscal capacity*) dan kebutuhan belanja (*fiscal needs*). Dengan demikian, fungsi dari alokasi DAU adalah untuk menutup gap yang terjadi karena *fiscal needs* melebihi *fiscal capacity* yang dimiliki suatu Daerah.

Pemerintah telah menaruh perhatian pada masalah keadilan dimana daerah yang lebih besar beban regionalnya menerima transfer yang lebih besar pula. Sisi lain dari keadilan ini adalah jumlah penduduk (populasi). Daerah yang populasinya tinggi otomatis menerima transfer lebih besar karena mempunyai beban regional yang lebih besar.. Pemerintah seharusnya jeli dalam memantau kenaikan jumlah penduduk sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan, ketidakseimbangan itu ditunjukkan dengan kenaikan dana transfer tidak sebanding dengan tingginya kenaikan jumlah penduduk.

Mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang mengindikasikan sikap over aktif pemerintah daerah terhadap pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Disisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi. Gejala ini memperlihatkan

bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima pusat. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran rutin. Kencenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiscal secara horizontal.



Daftar Pustaka

- Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika teori dan aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Arsyad, LPincolin (1999), *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Siregar, Baldric (2000), *Akutansi Pemerintahan dan Sistem Dana*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Hamid, Edi Suandi (2004), *Sistem Utang Luar Negeri dan Isu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Hamid Edi Suandi (2005), *Formula Alternatif DAU: Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo (2004), *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta.
- Vidyatama, Yogi (2000), *Metode Menilai Transfer Antar Pusat – Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Yogyakarta.
- Boex, Jameson (2003), *The Incidence of Local government Allocations in Tanzania*, George State University, USA.



HASIL REGRESI PANEL DATA DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/22/06 Time: 11:17

Sample: 2002 2003

Included observations: 2

Total panel observations 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1?)	-0.495889	1.578572	-0.314138	0.7541
LOG(X2?)	-0.098184	0.108303	-0.906562	0.3669
LOG(X3?)	1.257763	0.827198	1.520510	0.1316
LOG(X4?)	-0.596462	0.339050	-1.759214	0.0817
Fixed Effects				
_CILACAP-C	14.20356			
_BANYUMAS-C	14.39841			
_PURBALINGGA-C	14.25693			
_BANJARNEGARA-C	14.20073			
_KEBUMEN-C	14.32977			
_PURWOREJO-C	14.24729			
_WONOSOBO-C	14.22066			
_MAGELANG-C	14.13768			
_BOYOLALI-C	14.07133			
_KLATEN-C	14.65669			
_SUKOHARJO-C	13.87220			
_WONOGIRI-C	14.46374			
_KARANGANYAR-C	13.98978			
_SRAGEN-C	14.30063			
_BLORA-C	14.25998			
_REMBANG-C	14.08705			
_PATI-C	14.14711			
_KUDUS-C	13.59388			
_JEPARA-C	13.48739			
_DEMAK-C	13.90158			
_SEMARANG-C	13.85460			
_TEMANGGUNG-C	13.53330			
_KENDAL-C	14.19093			
_BATANG-C	13.85940			
_PEKALONGAN-C	13.86647			
_PEMALANG-C	14.12135			
_TEGAL-C	14.04588			
_BREBES-C	14.35859			
_KOTAMAGELANG-C	13.70466			
_KOTASURAKARTA-C	14.00925			
_KOTASALATIGA-C	13.16614			
_KOTASEMARANG-C	13.53750			
_KOTAPKLNGAN-C	12.99171			
_KOTATEGAL-C	13.52559			
R-squared	0.926134	Mean dependent var		19.26388
Adjusted R-squared	0.835033	S.D. dependent var		0.325649
S.E. of regression	0.132266	Sum squared resid		0.524831
F-statistic	125.3806	Durbin-Watson stat		3.885714
Prob(F-statistic)	0.000000			

HASIL REGRESI PANEL DATA DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: GLS (Variance Components)
 Date: 05/22/06 Time: 11:18
 Sample: 2002 2003
 Included observations: 2
 Total panel observations 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.71847	1.034373	12.29583	0.0000
LOG(X1?)	0.824205	0.315933	2.608796	0.0113
LOG(X2?)	0.046239	0.039899	1.158880	0.2509
LOG(X3?)	-0.435976	0.290320	-1.501707	0.1382
LOG(X4?)	0.094418	0.070761	1.334329	0.1869
Random Effects				
_CILACAP-C	0.031525			
_BANYUMAS-C	0.029581			
_PURBALINGGA-C	-0.006541			
_BANJARNEGARA-C	-0.031292			
_KEBUMEN-C	0.023884			
_PURWOREJO-C	0.028662			
_WONOSOBO-C	-0.011555			
_MAGELANG-C	0.008049			
_BOYOLALI-C	0.035157			
_KLATEN-C	0.074668			
_SUKOHARJO-C	-0.009114			
_WONOGIRI-C	0.000359			
_KARANGANYAR-C	0.014442			
_SRAGEN-C	0.003665			
_BLORA-C	0.058491			
_REMBANG-C	-0.049174			
_PATI-C	0.003742			
_KUDUS-C	-0.014982			
_JEPARA-C	0.003283			
_DEMAK-C	-0.058554			
_SEMARANG-C	-0.002255			
_TEMANGGUNG-C	-0.131836			
_KENDAL-C	0.051333			
_BATANG-C	0.019409			
_PEKALONGAN-C	-0.025094			
_PEMALANG-C	-0.033968			
_TEGAL-C	-0.026227			
_BREBES-C	-0.011798			
_KOTAMAGELANG-C	0.034868			
_KOTASURAKARTA-C	0.004201			
_KOTASALATIGA-C	-0.007415			
_KOTASEMARANG-C	-0.004816			
_KOTAPKLNGAN-C	-0.070611			
_KOTATEGAL-C	0.069914			

GLS Transformed
 Regression

R-squared	0.829492	Mean dependent var	19.26388
Adjusted R-squared	0.818667	S.D. dependent var	0.325649
S.E. of regression	0.138672	Sum squared resid	1.211488